



**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KOMUNIKASI & DESAIN KREATIF
UNIVERSITAS BUDI LUHUR
Nomor : K/UBL/FKDK/000/015/02/25**

**TENTANG
KEWAJIBAN DOSEN MELAKSANAKAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
FAKULTAS KOMUNIKASI & DESAIN KREATIF UNIVERSITAS BUDI LUHUR
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

- Menimbang : a) Bahwa untuk meningkatkan kinerja Dosen dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di Fakultas Komunikasi & Desain Kreatif Universitas Budi Luhur.
b) Bahwa dipandang perlu meningkatkan peran Dosen dalam pengembangan keilmuan dan karya nyata dalam kehidupan masyarakat.
- Mengingat : 1) Undang-Undang Nomor 12/Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia/Tahun 2012 Nomor 5336);
2) Undang-Undang Nomor 20/Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia/Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3) Undang-Undang Nomor 60/Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
4) Peraturan Pemerintah Nomor 17/Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
5) Permendikbudristek Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6) Statuta Universitas Budi Luhur No. K/YBLC/KET/000/216/06/23;
7) Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti No. K/YBLC/KET/000/072/03/23 tentang Pengangkatan Dekan

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Mewajibkan setiap dosen tetap Fakultas Komunikasi & Desain Kreatif Universitas Budi Luhur untuk memiliki *roadmap* penelitian, menyusun rencana atau proposal penelitian, melaksanakan penelitian, dan menyusun karya ilmiah minimal satu karya dalam satu semester.
- Kedua : Mewajibkan setiap dosen tetap Fakultas Komunikasi & Desain Kreatif untuk terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat minimal satu kegiatan dalam satu semester.
- Ketiga : Mewajibkan setiap dosen Fakultas Komunikasi & Desain Kreatif untuk mengajar sesuai dengan jadwal dan mata kuliah yang telah ditetapkan Ketua Program Studi.
- Kempat : Dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi setiap dosen berkewajiban membuat laporan kepada Ketua Program Studi terkait dan bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Komunikasi & Desain Kreatif Universitas Budi Luhur.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 24 Februari 2025
Dekan Fakultas Komunikasi & Desain Kreatif
Universitas Budi Luhur



Rocky Prasetyo Jati



UNIVERSITAS BUDI LUHUR

Fakultas Komunikasi & Desain Kreatif

KAMPUS PUSAT : Jl. Raya Ciledug, Petukangan Utara, Jakarta Selatan 12260

Telp : (021) 5853753 (Hunting) Fax : (021) 7371164, 5853752

Website : <http://www.budiluhur.ac.id>

Lampiran Keputusan Dekan Fakultas Komunikasi & Desain Kreatif Universitas Budi Luhur

Nomor : K/UBL/FKDK/000/015/02/25

Tentang : Kewajiban Dosen Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi Fakultas Komunikasi & Desain Kreatif
Universitas Budi Luhur Semester Genap Tahun 2024/2025

NO	NAMA
1.	Abdul Azis, S.S, M.I.Kom
2.	Dr. Afrina Sari, S.Sos, M.Si
3.	Drs. Ahmad Pramegia, M.I.Kom
4.	Ahmad Thabathaba'I Saefudin, S.I.Kom., M.Ds.
5.	Dr. Ahmad Toni, S.Sos.I., M.I.Kom
6.	Amin Aminudin, S.Kom.I, M.I.Kom
7.	Anastasia Putri Kristiani, M.I.Kom
8.	Anggun Putri Dewanggi I.B, S.Sos, M.M
9.	Arbi Cristional Lokananta, S.I.Kom., M.I.Kom
10.	Archita Desia Logiana, S.Ds., MM
11.	Dr. Arief Ruslan, S.Kom. M.Sn.
12.	Arif Nur Hidayat, S.Kom., M.I.Kom
13.	Artyasto Jatisidi, S.I.Kom., M.I.Kom
14.	Benny Muhdaliha, S.Sn., M.Sn
15.	Danang Soeminto, S.Sos., M.I.Kom
16.	Denik Iswardani Witarti, S.I.P, M.Si, Ph.D
17.	Dewi Pugersari, S.Ds, M.Ds
18.	Dhika Purnama Putra, S.I.Kom., M.Sn
19.	Dini Maryani Sunarya, S.Sos, M.Si
20.	Doddy Wihardi, S.I.P., M.I.Kom
21.	Dominggo Subandrio, S.Sn., M.I.Kom
22.	Dr. Dudi Iskandar, S.Ag., M.I.Kom
23.	Dwi Kristanto, S.H., M.M
24.	Drs. Dwi Prijono Soesanto, M.I.Kom
25.	Eko Sumardi, S.Sos., M.I.Kom
26.	Eryco Muhdaliha, S.E, M.M
27.	Fatma Misky, S.I.Kom., M.Sn
28.	Geri Suratno, S.I.Kom., M.I.Kom
29.	Harningsih, S.I.Kom., M.I.Kom
30.	Haronas Kutanto, S.P.T., M.I.Kom
31.	Dr. I.G.P. Wiranegara, S.Sn., M.Sn
32.	Dr. Indah Suryawati, S.Sos, M.Si
33.	Jeanie Annissa, S.I.P, M.Si
34.	Julaiha Probo Anggraini, S.Si, M.Kom
35.	Laksmi Rachmaria, S.Sos., M.I.Kom
36.	Liza Dwi Ratna Dewi, S.Sos, M.Si
37.	Medya Apriliansyah, S.E, M.Si
38.	Mira Herlina, S.Sos., M.I.Kom
39.	Muhammad Ikhwan, S.Sos., M.I.K
40.	Muhammad Iqbal Naufal, S.I.Kom., M.I.Kom
41.	Muhammad Shaufi, S.Pd.I., M.Pd.I
42.	Muhammad Syaid Agustiar, S.Sos., M.I.Kom
43.	Mulyati, S.I.Kom., M.I.Kom
44.	Dr. Nawiroh Vera, S.Sos, M.Si
45.	Nexen Alexandre Pinontoan, S.I.Kom., M.I.Kom
46.	Dr. Ni Gusti Ayu Ketut Kurniasari, S.I.P, M.Si
47.	Nurfitrianah Octavianingrum Raharjo Putri, S.Sn., M.Sn
48.	Prof. Dr. Ir. Prudensius Maring, M.A
49.	Putro Nugroho, S.S.T, M.I.Kom
50.	Dra. Rachmi Kurnia Siregar, M.I.Kom
51.	Raden Wahyu Utomo Martianto, S.I.Kom., M.I.Kom
52.	Rahajeng Puspitosari, S.I.Kom., M.I.Kom
53.	Rama Romindo Utomo, M.I.Kom
54.	Rana Syakirah Rinaldi, S.I.Kom., M.I.Kom
55.	Ria Anggraini, S.I.Kom, M.I.Kom
56.	Ricky Widyananda Putra, S.I.Kom., M.Sn
57.	Rifqi Muflih, S.Sos, M.Si
58.	Rini Lestari, S.Sos., M.I.Kom
59.	Dr. Riyodina Ganefsri Pratikto, M.Si
60.	Dr. Rocky Prasetyo Jati, S.P.T., M.Si
61.	Dr. Safriady, S.Sos, M.Si
62.	Sangga Arta Witama, S.I.Kom., M.I.Kom
63.	Sekarseta Prihatmadi, S.P.T., M.I.Kom
64.	Shinta Kristanty, S.Sos, M.Si
65.	Sinta Dwi Utami, S.I.P., M.I.Kom
66.	Sukma Alam, S.I.Kom., M.I.Kom
67.	Suwarno, S.Sos., M.I.Kom
68.	Dr. Umaimah, S.Fil., M.Si
69.	Wahyu Arnisa, S.I.Kom., M.Ds.



UNIVERSITAS BUDI LUHUR

Fakultas Komunikasi & Desain Kreatif

KAMPUS PUSAT : Jl. Raya Ciledug, Petukangan Utara, Jakarta Selatan 12260

Telp : (021) 5853753 (Hunting) Fax : (021) 7371164, 5853752

Website : <http://www.budiluhur.ac.id>

70.	Wedha Stratesti Yudha, S.S., M.Sc
71.	Wenny Maya Arlena, S.Sos, M.Si
72.	Yousep Eka Irawan Apriandi, S.P.T., M.I.Kom
73.	Yuliana Choerul Reza, M.I.Kom
74.	Zakaria Satrio Darmawan, S.P.T., M.I.Kom

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 24 Februari 2025

Dekan Fakultas Komunikasi & Desain Kreatif

Universitas Budi Luhur



Rocky Prasetyo Jati

Kecenderungan Media dalam Polemik Tambang Nikel Raja Ampat (Analisis Bingkai Berita Kompas.com)

Rachmi Kurnia Siregar

Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi & Desain Kreatif
Universitas Budi Luhur-Jakarta

Email: rachmi.kurnia@budiluhur.ac.id

ABSTRAK

Adanya aktifitas tambang nikel di Raja Ampat memicu kontroversi khalayak publik. Polemik ini memantik tanggapan masyarakat akan potensi kerusakan ekosistem lingkungan di Raja Ampat. Beragam masyarakat menuntut agar pemerintah pusat segera mencabut izin usaha pertambangan (IUP) perusahaan yang masih melakukan kegiatan pertambangan nikel. Berawal dari tuntutan aliansi masyarakat, berdampak pada polemik tambang nikel Raja Ampat semakin mendapatkan porsi pemberitaan utama oleh media massa. Berbagai media besar pun turut andil memberitakan informasi ini kepada masyarakat luas. Seperti media *online* Kompas.com yang akan dikaji dalam penelitian ini. Merujuk pada latar belakang masalah, peneliti terpantik dalam mengkaji kecenderungan media Kompas.com dalam membingkai polemik tambang nikel di Raja Ampat. Penelitian ini menggunakan model analisis *framing* Robert N Entman dalam mengkaji penelitian. Peneliti menseleksi lima berita yang akan dikaji dalam rentang edisi 12-19 Juni 2025 yang dirilis oleh Kompas.com. Hasil penelitian menunjukkan terdapat dua bingkai yang ditekankan oleh Kompas.com. Bingkai pertama, Kompas.com cenderung berada dalam sisi tanggapan kalangan masyarakat dan akademisi yang menyuarakan agar pemerintah segera menanggapi tuntutan publik. Selanjutnya bingkai kedua adalah Kompas.com cenderung memposisikan perannya sebagai media dengan gencar menyuarakan supaya Raja Ampat dapat terjaga kelestarian ekosistemnya dengan baik.

Kata kunci: Kompas.com; Kecenderungan Media; Pembingkai Media, Raja Ampat; Tambang Nikel

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam hayati menjadi keunggulan tersendiri yang tidak dimiliki oleh negara lain. Beragamnya keanekaragaman hayati serta ekosistem yang dimiliki oleh Indonesia, membuat nilai dan kualitas sumber daya alam Indonesia tidak diragukan lagi dan menjadi kekayaan alam terbesar di dunia (Faradita, 2024). Banyak kekayaan alam di Indonesia menjadi ladang pendapatan nasional bagi negara (Irham et al., 2024). Bahkan sanggup melakukan ekspansi ekspor sumber daya alam (SDA) ke beberapa

negara luar. Beraneka ragam jenis SDA Indonesia yang berkualitas seperti kandungan timah, tembaga, emas, minyak dan nikel menjadikan negara ini mempunyai potensi alam yang sangat melimpah (Murti & Maya, 2021). Seperti dengan nikel merupakan jenis sumber daya mineral (SDM) terbesar yang dihasilkan oleh Indonesia.

Kekuatan cadangan nikel Indonesia mencapai 55.000.000 ton (USGS 2024) memainkan peran penting dalam sektor perdagangan antar negara, khususnya dalam menyikapi bertambahnya permintaan stok nikel yang signifikan (Randrikasari et al., 2025). Hal ini memantik pemerintah pusat selaku pemangku kebijakan untuk gencar melakukan hilirisasi nikel dan kemudian mengeksport nikel ke beberapa negara. Fenomena hilirisasi ini adalah jawaban dari pemerintah yang telah menganalisis tren perkembangan kendaraan listrik di seluruh dunia yang semakin tahun mengalami laju pertumbuhan populasi. Sebagai halnya, nikel merupakan komponen terpenting dalam pengembangan kendaraan listrik yaitu sebagai sumber tenaga (baterai) kendaraan listrik (*electric vehicle*) atau saat ini familiar dikenal dengan istilah kendaraan EV (Adi, 2024).

Kemajuan populasi kendaraan listrik di Indonesia sepanjang Januari hingga April 2025 bersumber dari data Gaikindo mencatatkan penjualan sebesar 23,9 ribu unit. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 211% jika dibandingkan dengan data penjualan kendaraan listrik khususnya mobil listrik periode Januari sampai April 2024 (Yonatan, 2025). Mengacu pada data ini, secara jelas terlihat bahwa kemajuan kendaraan listrik sangat signifikan dan beragam pengguna mulai beralih menggunakan kendaraan berbasis tenaga baterai (Battery Electric Vehicle/BEV) dari kendaraan berbasis bahan bakar (Internal Combustion Engine/ICE) sesuai dengan percepatan program kendaraan bermotor listrik (Nur & Kurniawan, 2021).

Peralihan penggunaan kendaraan listrik berdampak pada permintaan stok nikel khususnya sebagai bahan utama dalam membuat baterai kendaraan listrik (BEV) di seluruh dunia. Indonesia selaku negara penghasil nikel terbesar di dunia dengan cadangan nikel sebesar 52% juga turut berpartisipasi dalam kampanye BEV salah satunya dengan melakukan hilirisasi nikel bertaraf besar di beberapa wilayah tanah air (Radhica & Wibisana, 2023). Seperti yang terjadi di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, sedang dilakukan ekspansi hilirisasi

tambang nikel yang menuai sorotan publik. Raja Ampat yang dikenal dengan wilayah yang mempunyai pemandangan serta kelestarian alam sangat indah kini terganggu oleh aktivitas pertambangan nikel yang ditenggarai dapat merusak ekosistem alam Raja Ampat (Sani & Syamsyuddin, 2025).

Realitanya, hilirisasi nikel di Raja Ampat memicu protes dari masyarakat sejak sejumlah aktivis Greenpeace Indonesia menyampaikan aspirasi damai dalam kegiatan konferensi Indonesia Critical Minerals Conference & Expo tanggal 3 Juni 2025 (Putra et al., 2025). Aspirasi yang dilayangkan oleh Greenpeace tersebut berupa mencabut izin tambang nikel di Raja Ampat, mengkaji ulang kebijakan hilirisasi nikel di Indonesia, dan mengakhiri penderitaan rakyat Indonesia yang terdampak akibat kebijakan industrialisasi nikel (Greenpeace, 2025). Serta menuntut agar pemerintah mencabut izin usaha pertambangan (IUP) perusahaan yang sedang melakukan pertambangan nikel di Raja Ampat yaitu PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa (Korua, 2025).

Langkah yang dilakukan oleh Greenpeace dengan maksud agar pemerintah pusat dapat hadir dalam melindungi ekosistem Raja Ampat yang berpotensi akan rusak jika kegiatan pertambangan nikel masih berjalan. Tuntutan dari Greenpeace beserta beragam protes dari berbagai kalangan masyarakat maupun akademisi, kemudian mendapatkan respon dari pemerintah pusat melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Tanggapan Menteri ESDM ihwal hilirisasi nikel di Raja Ampat menyatakan lokasi tambang nikel masih jauh dari wilayah wisata Raja Ampat berjarak 30-40 KM. Serta terdapat satu perusahaan yang masih diizinkan untuk beroperasi yakni PT GAG Nikel selaku anak perusahaan dari PT Antam (Budiono & S, 2025).

Kejadian ini menyebabkan kekhawatiran di kalangan masyarakat akan respon dari pemerintah pusat khususnya Presiden Prabowo dalam menyikapi polemik tambang nikel di Raja Ampat dengan memerintahkan jajarannya untuk meninjau ulang kawasan Raja Ampat yang terdampak tambang nikel (Setpres, 2025). Dalam konteks ini, media massa mempunyai peranan penting dalam agenda mengkonstruksi opini publik mengacu pada informasi yang akan dikeluarkan oleh pemerintah pasti akan disebarkan oleh media berbentuk sebuah berita. Suatu

informasi berita yang diberitakan bukan hanya sekedar menginformasikan suatu fakta, tetapi juga dapat mengkonstruksi wacana tersebut sehingga menjadi perbincangan di khalayak publik (Iskandar & Lestari, 2016).

Beragam media massa pun turut memberitakan polemik tambang nikel di Raja Ampat sebagai kajian berita nasional. Salah satu media massa yang turut menginformasikan polemik hilirisasi nikel ini yaitu Kompas.com yang merupakan media terbesar di Indonesia. Kompas.com dengan visi dan misi media menjadi perusahaan yang terbesar, terbaik, terpadu, dan terbesar di Asia Tenggara membuat media ini gencar dalam memberitakan informasi yang dipandang memiliki nilai dampak besar bagi kehidupan masyarakat (Maulana & Prasetyowati, 2022). Kompas.com mempertahankan identitas media sebagai media *online* dengan menampilkan informasi yang aktual, dapat dipercaya serta memiliki kualitas tinggi dan relevan (Mahdi, 2025).

Melalui pemberitaan di Kompas.com, pemilihan dan penentuan informasi dikaji berdasarkan aspek bagaimana media dapat menyusun serta membingkai informasi sehingga dapat berdampak pada pemahaman dan opini publik. Sebagai halnya opini merupakan sudut pandang atau perspektif masyarakat terhadap sebuah permasalahan atau fenomena (Kusumaningsih, 2024). Media tidak langsung dapat mempengaruhi pada persepsi masyarakat tetapi cukup berdampak pada bagaimana suatu informasi tersebut diterima dan ditafsirkan oleh khalayak (Kusnanto & Yusuf, 2024). Salah satu cara media dalam membentuk opini publik adalah melalui proses pembingkai informasi pemberitaan atau yang biasa dikenal dengan istilah bingkai berita (Kurniansyah, 2025).

Dengan melalui kajian analisis *framing*, dapat terlihat bagaimana Kompas.com membingkai pemberitaan polemik tambang nikel di Raja Ampat, serta apakah terdapat kecenderungan tertentu dalam menyoroti pihak-pihak ataupun pemilihan sumber utama informasi yang dibahas oleh Kompas.com. Maka dari itu, merujuk pada latar belakang penelitian yang telah dibahas, rumusan masalah yang dapat ditetapkan yaitu “Bagaimana kecenderungan media Kompas.com dalam membingkai berita polemik tambang nikel di Raja Ampat?”.

Sebelumnya penelitian oleh Fajar Sasora (2025) membahas perbandingan bingkai informasi tambang nikel di Raja Ampat oleh media *online* Kompas.com dan CNN Indonesia

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan bingkai antara kedua media tersebut. Kompas.com lebih menekankan agar kegiatan pertambangan dievaluasi kembali dan mengusulkan agar aktifitas tambang dihentikan sementara waktu. Sedangkan CNN Indonesia lebih membahas peran negara dalam perbaikan kebijakan melalui pengembangan rencana induk strategis.

Dwita et al. (2023) dalam penelitiannya menyoroti berita dampak PT. Medco terhadap masyarakat lingkar tambang yang dibingkai oleh media *online* AJNN.net dengan menggunakan model analisis *framing* menurut Murray Edelman menunjukkan bahwa media AJNN.net berpihak pada masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.

Kemudian penelitian oleh (A'yyuun, 2025) dalam penelitiannya mengkaji berita isu wilayah izin usaha pertambangan (IUP) yang akan diberikan kepada organisasi keagamaan Muhammadiyah yang dibingkai oleh media Suaramuhammadiyah.id menggunakan model analisis *framing* menurut William A Gamson menampilkan bahwa media ini mendukung kebijakan izin kelola tambang yang diterima oleh Muhammadiyah dan mengindikasikan Suaramuhammadiyah.id mengikuti arahan dan instruksi kebijakan sesuai dengan isu-isu yang berkembang di organisasi keagamaan Muhammadiyah.

Mengacu pada penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dibahas oleh peneliti, kemudian terdapat tiga penelitian terdahulu yang peneliti kaji sebagai instrumen awal dalam mengkaji serta membedah pokok permasalahan utama nantinya akan dikaji pada penelitian ini, maka kemudian dapat terungkap perbedaan dan hasil temuan antara penelitian ini dengan tiga penelitian terdahulu sebelumnya.

METODE PENELITIAN

Peneliti membedah kecenderungan media Kompas.com dalam membingkai berita polemik tambang nikel di Raja Ampat dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Mulyana (2018) penelitian kualitatif merupakan penelitian interpretif dengan memakai berbagai metode dalam membedah permasalahan pada sebuah penelitian. Penelitian ini memiliki fokus pada analisis bingkai berita polemik tambang nikel di Raja Ampat dengan mengkaji pada kecenderungan bingkai di media *online* Kompas.com.

Peneliti menggunakan model analisis *framing* Robert N Entman yang meliputi empat elemen bingkai yaitu pendefinisian masalah, identifikasi sumber masalah, membuat keputusan moral, dan menjabarkan jalan keluar penyelesaian (Eriyanto, 2018). Serta peneliti menggunakan dua dimensi besar *framing* Entman yakni seleksi isu dan penonjolan aspek tertentu. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dokumentasi, observasi dan studi literatur selama proses pengerjaan riset. Subjek penelitian ini adalah media *online* Kompas.com dan objek penelitian ini yaitu berita terkait dengan polemik tambang nikel di Raja Ampat yang dirilis oleh Kompas.com dalam edisi 12-19 Juni 2025. Peneliti memilih lima berita yang akan dianalisis setelah melalui proses seleksi isu dengan menyoroti pada pemilihan informasi atau sumber utama dalam pemberitaan yakni dari kalangan masyarakat, akademisi, maupun pemerintah.

Tabel 1. Berita Polemik Tambang Nikel Raja Ampat di Kompas.com

No.	Judul Berita	Edisi	Waktu Rilis
1.	Mahasiswa Demo Tolak Tambang Nikel di Raja Ampat Hingga PSN di Sorong, Minta Menteri ESDM Cabut UIP PT GAG Nikel	Kamis, 12 Juni 2025	19:57 WIB
2.	Greenpeace: Persoalan Tambang Raja Ampat Bukti Pemerintah Masih ‘No Viral No Justice’	Jumat, 13 Juni 2025	11:24 WIB
3.	Bicara Tambang, PBNU Sebut Jaga Lingkungan Terlalu Ekstrem Juga Berdampak Negatif	Jumat, 13 Juni 2025	15:28 WIB
4.	KKP Sebut Laut Raja Ampat Tak Terdampak Tambang: Ikan Masih Banyak	Rabu, 18 Juni 2025	15:34 WIB
5.	Ahli IPB: Tambang Nikel di Raja Ampat Ancam Paus Sperma, Kima, Raksasa, dan Pari Manta	Kamis, 19 Juni 2025	12:45 WIB

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Empat Elemen *Framing* Robert N Entman di Kompas.com

Robert N Entman dalam kajian analisis bingkai media menjabarkan sebuah wawasan tentang bagaimana sebuah media massa dan peranan redaksi dalam mengkonstruksi sebuah realitas peristiwa menjadi sebuah informasi dan kemudian akan diterima oleh publik (Eriyanto, 2018). *Framing* menurut Entman terdapat empat elemen analisis bingkai yaitu pendefinisian masalah (*problem definition*) tentang esensi atau intisari dari sebuah masalah. Yang kedua,

identifikasi sumber masalah (*causal interpretation*) mengenai bagaimana media mengidentifikasi sumber masalah dalam sebuah pemberitaan. Ketiga, membuat keputusan moral (*moral adjudgment*) membahas bagaimana media menekankan penilaian seperti apa yang dikaji. Serta terakhir menjabarkan jalan keluar penyelesaian (*treatment recommendation*) menyoroti bagaimana media menyajikan solusi akhir ataupun akhir dari informasi pemberitaan.

Tabel 2. *Framing* Berita Pertama Kompas.com

Judul. Mahasiswa Demo Tolak Tambang Nikel di Raja Ampat Hingga PSN di Sorong, Minta Menteri ESDM Cabut UIP PT GAG Nikel

Pendefinisian Masalah	Beberapa mahasiswa menolak aktifitas tambang nikel di Raja Ampat karena dinilai dapat merusak lingkungan.
Identifikasi Sumber Masalah	Pemerintah menerbitkan surat izin usaha pertambangan (IUP) pertambangan nikel di Raja Ampat tanpa mempertimbangkan suara rakyat dan abai terhadap lingkungan.
Membuat Keputusan Moral	Adanya demonstrasi dari mahasiswa dinilai sebagai tindakan perjuangan dalam mempertahankan kelestarian Raja Ampat.
Menjabarkan Jalan Keluar Penyelesaian	Mahasiswa menuntut agar pemerintah khususnya Menteri ESDM dengan segera mencabut IUP operasi perusahaan tambang khususnya PT GAG Nikel.

Tabel 3. *Framing* Berita Kedua Kompas.com

Judul. Greenpeace: Persoalan Tambang Raja Ampat Bukti Pemerintah Masih “No Viral No Justice”

Pendefinisian Masalah	Pemerintah hanya mencabut izin usaha pertambangan (IUP) di Raja Ampat setelah adanya tekanan dan viralnya tagar #SaveRajaAmpat di media sosial.
Identifikasi Sumber Masalah	Pemerintah cenderung responsif terhadap isu hanya jika mendapat sorotan atau tekanan dari publik melalui media sosial.
Membuat Keputusan Moral	Kebijakan pemerintah hanya berdasarkan pada sesuatu yang dianggap bernilai viral dan lamban apabila masalah tidak viral.
Menjabarkan Jalan Keluar Penyelesaian	Pemerintah diharapkan dapat mengambil kebijakan publik dengan berdasarkan pada hak dan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia.

Tabel 4. *Framing* Berita Ketiga Kompas.com

Judul. Bicara Tambang, PBNU Sebut Jaga Lingkungan Terlalu Ekstrem Juga Berdampak Negatif

Pendefinisian Masalah	Terkait dengan perspektif dalam mempertahankan konsep kelestarian lingkungan berjangka panjang.
-----------------------	---

Identifikasi Sumber Masalah	Persepsi masyarakat menyatakan bahwa beragam operasional kegiatan pertambangan merupakan sebuah tindak kejahatan terstruktur.
Membuat Keputusan Moral	Keadilan moral yakni dengan meninjau kembali nilai maslahat serta mafsadat secara berimbang dan tanpa pandang bulu.
Menjabarkan Jalan Keluar Penyelesaian	Gus Ulil menyarankan agar kegiatan pertambangan dapat dilakukan secara bertanggung jawab dengan melihat beragam aspek.

Tabel 5. *Framing* Berita Keempat Kompas.com
Judul. KKP Sebut Laut Raja Ampat Tak Terdampak Tambang: Ikan Masih Banyak

Pendefinisian Masalah	Dirjen PSDKP KKP mengutarakan bahwa adanya aktifitas tambang tidak membuat kelestarian ekosistem laut menjadi rusak.
Identifikasi Sumber Masalah	Aktifitas tambang nikel di Raja Ampat ditenggarai membawa sejumlah permasalahan salah satunya berdampak pada kerusakan lingkungan.
Membuat Keputusan Moral	Ekosistem flora dan fauna di perairan Raja Ampat masih terjaga dengan sangat baik kelestariannya.
Menjabarkan Jalan Keluar Penyelesaian	Tim KKP menekankan IUP 4 perusahaan tambang sudah dicabut dan tinggal perusahaan PT GAG Nikel yang masih beroperasi.

Tabel 6. *Framing* Berita Kelima Kompas.com
Judul. Ahli IPB: Tambang Nikel di Raja Ampat Ancam Paus Sperma, Kima, Raksasa, dan Pari Manta

Pendefinisian Masalah	Aktifitas tambang nikel di Raja Ampat sangat berpotensi pada gangguan kesehatan ekosistem fauna laut.
Identifikasi Sumber Masalah	Pencemaran lingkungan akibat dari operasional pertambangan sangat berpotensi menurunkan kadar oksigen laut dan mengancam habitat hidup biota laut di perairan Raja Ampat.
Membuat Keputusan Moral	Paus sperma, pari manta dan kima raksasa merupakan tiga ekosistem fauna terbesar Raja Ampat yang hidupnya sangat bergantung pada keseimbangan lingkungan di wilayah perairan tersebut.
Menjabarkan Jalan Keluar Penyelesaian	Akademisi IPB, Dr. Meutia menekankan agar perlunya diadakan tinjauan kembali terhadap potensi risiko aktifitas tambang nikel secara komprehensif dan mengkampanyekan agar manajemen aktifitas tambang dapat dikelola secara bertanggung jawab.

Pembahasan Dua Dimensi Besar *Framing*

Seleksi Isu serta Penonjolan Aspek Tertentu di Kompas.com

Eriyanto (2018) menyatakan seleksi isu adalah kegiatan kajian pembingkai berita yang terkait dalam kerangka pengumpulan sumber-sumber realitas fakta peristiwa. Merujuk pada indikator bagaimana sebuah berita yang berdampak sangat besar akan dipilih untuk disebarluaskan kepada publik serta terdapat aspek-aspek berita yang ada atau tidak ada ditampilkan kepada masyarakat. Sementara itu penonjolan aspek tertentu merupakan komponen *framing* yang fokus bagaimana sebuah informasi ditekankan melalui penggunaan istilah kata dan kalimat nyentrik sehingga dapat mempengaruhi persepsi publik. Penonjolan aspek tertentu juga melihat bagaimana sebuah realitas peristiwa dikonstruksi oleh jurnalis dengan menggunakan tutur bahasa ataupun sumber informasi yang berbeda dengan media lainnya.

Dalam analisis bingkai berita pertama Kompas.com menyoroti kegiatan demonstrasi yang dilakukan oleh aliansi masyarakat dan kelompok mahasiswa Papua bertempat di Kota Jayapura dengan menuntut agar pemerintah pusat mencabut IUP perusahaan tambang nikel di Raja Ampat. Seleksi isu yang dipilih oleh Kompas.com dalam berita ini yaitu dengan memilih sumber informasi ataupun aspirasi dari mahasiswa yang dikenal dengan kelompok dalam membela kebenaran serta kritis terhadap suatu isu. Tuntutan dari mahasiswa tersebut bermaksud agar pemerintah lebih peka terhadap kondisi ekosistem Raja Ampat yang terancam rusak imbas pertambangan nikel.

Sikap mahasiswa merefleksikan bukti kepedulian terhadap wilayah asli kebanggaan mereka yang kini tergadai oleh adanya eksploitasi lingkungan secara besar-besaran. Kompas.com melihat isu demonstrasi mahasiswa ini sebagai opini publik paling mendukung dalam menyuarakan kebenaran dan keberanian. Seperti pada terdapatnya penonjolan aspek yang digunakan oleh Kompas.com yaitu dalam kalimat “kami menuntut Presiden Prabowo untuk memberantas mafia tambang” sebagai penjelasan dari amarah mahasiswa agar kepala negara dapat menuntaskan polemik tambang nikel ini secara berkeadilan dan tanpa pandang bulu.

Berlanjut ke berita kedua yang peneliti analisis bersumber dari berita di Kompas.com dengan membahas isu pernyataan dari pihak Greenpeace Indonesia menanggapi atas langkah pemerintah pusat mencabut IUP perusahaan tambang nikel di Raja Ampat setelah polemik ini

viral di kalangan publik. Dalam berita ini, Kompas.com ingin menekankan bahwa suatu berita yang mendapatkan perhatian publik maka akan direspon oleh pemerintah. Sejatinya anggapan ini merupakan sebuah kejadian anomali, seharusnya pemerintah lebih sigap membaca masukan dari rakyat sebelum masalah lebih jauh terungkap kepada publik.

Maka timbul istilah "*no viral no justice*" yang mengisyaratkan kini di Indonesia apabila terdapat sebuah permasalahan maka mengharuskan rakyat untuk memviralkan masalah tersebut sampai akhirnya instansi atau pihak yang dituju akan menanggapi. Kompas.com dalam penonjolan aspek di berita ini mengangkat pernyataan dari Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Iqbal Damanik dengan terdapatnya sebuah kalimat "ini mempertegas bahwa pemerintah saat ini *no viral no justice*". Kalimat ini menggambarkan betapa mirisnya realita di Indonesia untuk memperjuangkan keadilan dan mempertahankan konstitusi hukum perlu upaya awal dari rakyat untuk bergerak terlebih dahulu. Alih-alih pencabutan IUP perusahaan tambang, Greenpeace Indonesia merasa pengambilan kebijakan oleh pemerintah berdasarkan setelah polemik ini ramai diperbincangkan oleh khalayak.

Di berita ketiga yang dikaji bersumber pada berita ditayangkan oleh Kompas.com, peneliti menseleksi isu dengan memilih sumber informasi dari Nadlatul Ulama melalui Ketua PBNU Ulil Abshar menanggapi polemik tambang nikel ini. Kompas.com dalam pemberitaan edisi ini memasukkan komentar dari Ulil menyatakan bahwa terdapat sisi hal keberimbangan antara menjaga lingkungan dan mengizinkan kegiatan pertambangan. Walaupun saat ini publik merasa geram atas tindakan keji perusahaan tambang yang tega mengeksploitasi keindahan Raja Ampat hanya untuk mendapatkan keuntungan, NU melihat semestinya publik juga sadar bahwa dibalik aktifitas tambang terdapat sebuah kebermanfaatan bagi pendapatan negara.

Penonjolan aspek yang ditekankan pada Kompas.com memperlihatkan sisi kebijakan dari NU yang menganggap polemik tambang nikel tidak boleh dilihat secara satu sisi berdasarkan kerugian masyarakat. Hal utama ditonjolkan oleh Kompas.com merujuk pada pernyataan dari Ulil selaku pihak NU mengutarakan bahwa pemerintah kini sedang mengalami fase dilemma. Di satu sisi harus mempertahankan pendapatan untuk negara, di sisi lain harus menyikapi masukan dan tuntutan rakyat secara berkeadilan. Seperti terdapatnya kalimat "Jadi saya kepingin berada

pada posisi yang memahami dilema.” Frasa kalimat ini membawa sebuah pesan dari NU kepada masyarakat maupun pemerintah agar sama-sama melihat polemik ini bukan hanya dari sisi kerugian saja. Akan tetapi, dilihat dari bagaimana kegiatan pertambangan justru dapat mendatangkan pendapatan bagi negara.

Selanjutnya mengkaji berita keempat yang diseleksi berdasarkan berita di Kompas.com, peneliti menyoroiti isu komentar dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) atas polemik ini. Alih-alih mendengarkan tuntutan dari publik, KKP justru mengeluarkan pernyataan bahwa adanya aktifitas tambang sama sekali tidak berdampak pada ekosistem fauna laut di perairan Raja Ampat. Pernyataan ini diperkuat dengan temuan yang telah dilakukan oleh KKP ketika tim mereka melakukan penyelaman tidak ditemukan adanya bukti terumbu karang ataupun ikan yang terdampak. Kompas.com memperkuat dengan sumber informasi utama dari Dirjen PSDKP KKP Pung Nugroho sebagai pihak yang dianggap memiliki kapabilitas dalam menanggapi polemik tambang nikel ini. Mengingat, tupoksi dari KKP adalah melaksanakan perlindungan kawasan laut serta merumuskan penataan ruang laut secara berkelanjutan.

Merujuk pada fungsi kementerian ini, KKP merasa pengawasan dalam melindungi perairan Raja Ampat imbas adanya aktifitas pertambangan nikel dinilai sudah sesuai satuan operasional prosedur (SOP). Hal ini ditonjolkan oleh Kompas.com dalam pemberitaannya seperti pada kutipan pernyataan yaitu “Ada video kita dan kita memastikan terumbu karang dan ikan tidak terganggu.” Kutipan sumber pernyataan ini juga merefleksikan bahwa apa yang selama ini dianggap oleh masyarakat akan terganggunya ekosistem laut Raja Ampat, ditepis oleh temuan yang dilakukan KKP. Maka kemudian pada pemberitaan ini Kompas.com berfokus pada bagaimana langkah tindakan KKP dalam menjawab tuntutan dan anggapan rakyat. Agar kemudian kedepannya pemerintah lebih sigap dalam menanggapi aspirasi rakyat sebagai pihak yang berwenang dalam mengeluarkan pernyataan dan merumuskan sebuah kebijakan.

Kemudian pada berita kelima yang dianalisis oleh peneliti merujuk pada berita yang dirilis oleh Kompas.com. Peneliti kembali menemukan isu yang diangkat oleh Kompas.com dengan memilih isu sumber utama dari kalangan akademisi dalam menanggapi polemik tambang nikel ini. Akademisi yang dipilih oleh Kompas.com datang dari Dosen Ilmu dan

Teknologi Kelautan Institut Pertanian Bogor yang mengutarakan keilmuannya terkait dengan dampak aktifitas tambang nikel di Raja Ampat bagi ekosistem laut. Kompas.com merasa pernyataan dari kalangan akademisi dapat menjadi sumber absah berdasarkan ilmu kelautan yang memadai sehingga dapat menjelaskan kepada masyarakat berbasis sumber pengetahuan.

Kompas.com pada berita edisi ini menonjolkan kekhawatiran dari Dr. Meutia selaku akademisi IPB akan kerusakan jangka panjang ekosistem laut Raja Ampat. Seperti terdapatnya sumber penelitian yang diutarakan oleh Meutia menemukan bahwa konsentrasi nikel tinggi berpeluang merusak mikroalga fotosintetik ekosistem laut. Sehingga dikhawatirkan apabila aktifitas pertambangan ini masih berlanjut maka tidak menutup kemungkinan lambat laun ekosistem laut di bawah perairan Raja Ampat akan mengalami kerusakan secara kontinu. Terlebih di kawasan Raja Ampat merupakan habitat dari spesies fauna langka yakni Paus Sperma, Pari Manta, dan Kima Raksasa. Kompas.com kembali mengutip pernyataan Meutia dalam kalimat “Ketiga fauna ini bergantung terhadap keseimbangan lingkungan Raja Ampat”. Apabila keseimbangan lingkungan sudah mulai terganggu, secara perlahan ekosistem spesies ini akan sangat berdampak untuk kedepannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil analisis *framing* terhadap terhadap berita polemik tambang nikel di wilayah Raja Ampat edisi 12-19 Juni 2025 yang dibingkai oleh media *online* Kompas.com terdapat beberapa bingkai informasi pemberitaan. Kompas.com dalam bingkai pertama cenderung berpihak pada sisi tanggapan dan komentar dari kalangan masyarakat dan akademisi. Hal ini diperkuat dengan adanya pemilihan narasumber utama dari dosen IPB, beberapa mahasiswa Papua, dan *Non-Government Organization* (NGO) Greenpeace Indonesia. Walaupun sebetulnya terdapat berita dari kalangan pemerintah dan organisasi keagamaan yang melihat polemik ini sebagai sebuah fenomena yang tidak menimbulkan dampak permasalahan besar.

Kemudian hal yang ditonjolkan oleh media *online* Kompas.com adalah dengan menyoroti respon kebijakan publik pemerintah pusat. Mengacu pada kasus ini, Kompas.com menekankan agar kedepannya pemerintah dapat mendengarkan aspirasi dan tuntutan masyarakat sebelum

sebuah informasi atau masalah viral di kalangan publik. Serta Kompas.com menitikberatkan aspek yang ditimbulkan dari aktifitas pertambangan nikel di Raja Ampat yang cenderung berpotensi pada kerusakan ekosistem lingkungan serta hilangnya kelestarian biota laut di perairan Raja Ampat. Artinya dapat digarisbawahi bingkai pemberitaan kedua yang dilakukan oleh Kompas.com adalah dengan cenderung berperan sebagai media yang mengkampanyekan agar konsep kelestarian lingkungan di Raja Ampat dapat terjaga dengan baik secara berkelanjutan melalui pemberitaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- A'yyuun, H. Q. (2025). *Framing Suara Muhammadiyah.id dalam Pusaran Isu Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus* [Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta]. https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/70986/1/21102010003_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
- Adi, E. A. W. (2024). Optimalisasi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai di Indonesia (Optimization of Battery Based Electric Motorized Vehicles in Indonesia). *Majalah Hukum Nasional*, 54(1), 50–69. <https://mhn.bphn.go.id/index.php/MHN/article/view/368>
- Budiono, E., & S, U. (2025). Menteri ESDM Bahlil Tegaskan Kawasan Raja Ampat Dilindungi. *Indonesia.Go.Id*. <https://indonesia.go.id/kategori/ekonomi-bisnis/9473/menteri-esdm-bahlil-tegaskan-kawasan-raja-ampat-dilindungi?lang=1>
- Dwita, A. S., Pramudya, G. W., & Sukmawati, A. I. (2023). Analisis Framing Murray Edelman Dalam Berita “Dampak PT. Medco Terhadap Masyarakat Lingkar Tambang” Pada Media AJNN.net. *JIMIK: Jurnal Ilmiah Manajemen Informasi Dan Komunikasi*, 7(2), 88–101. <https://doi.org/https://doi.org/10.56873/jimik.v7i2.290>
- Eriyanto. (2018). *Analisis Framing Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: PT. LKIS Printing Cemerlang.
- Faradita, S. (2024). Keanekaragaman Hayati Indonesia: Warisan dan Tanggung Jawab Bersama. In *Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang*. Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang. <https://itbwigalumajang.ac.id/keanekaragaman-hayati-indonesia-warisan-dan-tanggung-jawab-bersama/>
- Greenpeace. (2025). Seruan Greenpeace Indonesia untuk tambang nikel di Raja Ampat, Papua. *Greenpeace.Org*. <https://www.greenpeace.org/indonesia/petitions/save-raja-ampat/>
- Irham, F., R, M. Z. D., Gus Fauzan, R., & Rienaldy Pramasha, R. (2024). Peran Sumber Daya Alam dalam Mendorong Perekonomian Nasional. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(11), 1–17. <https://doi.org/10.62281>

- Iskandar, D. S., & Lestari, R. (2016). *Mitos Jurnalisme* (E. Risanto (ed.)). Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Korua, A. R. N. (2025). Lindungi Raja Ampat secara Penuh dan Permanen. *Greenpeace.Org*. <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/63103/lindungi-raja-ampat-secara-penuh-dan-permanen/>
- Kurniansyah, R. A. (2025). Pembingkai Media Dalam Berita Pergub Poligami ASN Pemprov DKI Jakarta (Studi Pada Media Detik.com dan Kompas.com). *SENAKOM: Prosiding Seminar Nasional Komunikasi*, 2(1), 205–216. <https://senakom.budiluhur.ac.id/sk/article/view/84/30>
- Kusnanto, & Yusuf, H. (2024). Pengaruh Media Massa Terhadap Persepsi Dan Tingkat Kriminalitas: Analisis Terhadap Efek Media Dalam Pembentukan Opini Publik. *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(2), 1047–1061. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>
- Kusumaningsih, R. (2024). Peran Media Dalam Mempengaruhi Opini Publik Tentang Hukum Dan Keadilan. *JISHUM: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 27–40. <https://doi.org/10.57248/jishum.v3i1.459>
- Mahdi, M. (2025). Strategi Manajemen Produk Media Kompas.com dalam Menghadapi Persaingan di Era Digital. *Jurnal Sindoro Cendikia Pendidikan*, 13(5), 125–144. <https://doi.org/10.9644/sindoro.v3i9.267>
- Maulana, A. H., & Prasetijowati, T. (2022). Analisis Bisnis Media Online “Kompas.Com.” *Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper “Pengarusutamaan Gender Dan Inklusi Sosial Untuk Pembangunan Berkelanjutan,”* 9(1), 223–232. <https://doi.org/10.38156/gesi.v9i01.148>
- Mulyana, D. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Murti, W., & Maya, S. (2021). *Pengelolaan Sumber Daya Alam* (Cetakan Pertama). Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada. <https://repository.penerbitwidina.com/media/publications/348689-pengelolaan-sumber-daya-alam-976ecbab.pdf>
- Nur, A. I., & Kurniawan, A. D. (2021). Proyeksi Masa Depan Kendaraan Listrik di Indonesia: Analisis Perspektif Regulasi dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim yang Berkelanjutan. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 7(2), 197–220. <https://doi.org/10.38011/jhli.v7i2.260>
- Putra, N., Ginanjar, R. P. A., & Dhanya, D. (2025). Serba-Serbi Polemik Tambang Nikel di Raja Ampat. *Tempo.Co*. https://www.tempo.co/ekonomi/serba-serbi-polemik-tambang-nikel-di-raja-ampat-1673228#goog_rewarded
- Radhica, D. D., & Wibisana, R. A. A. (2023). Proteksionisme Nikel Indonesia dalam Perdagangan

- Dunia. *Cendekia Niaga: Journal of Trade Development and Studies*, 7(1), 74–84.
<https://doi.org/10.52391/jcn.v7i1.821>
- Randrikasari, O., Suwardi, Oktariani, P., & Islamiyah, N. (2025). Penguatan Hilirisasi Nikel di Indonesia Melalui Teknologi Smelter Berbasis Energi Hijau (Strengthening Indonesia's Nickel Downstream Industry through Green Energy Based Smelter Technology). *Jurnal Pengelolaan Lingkungan Pertambangan*, 2(1), 35–46.
<https://doi.org/https://doi.org/10.70191/jplp.v2i1.60898>
- Sani, H., & Syamsyuddin. (2025). Konflik Penambangan Nikel di Raja Ampat: Analisis Etika Lingkungan dan Rekayasa Pertambangan untuk Konservasi Berkelanjutan. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 4(2), 3453–3461.
- Sasora, F. (2025). Framing Analysis of Nickel Mining News in Raja Ampat: Kompas.com and CNN Indonesia. *JIRK: Journal of Innovation Research and Knowledge*, 5(2), 2119–21130.
- Setpres, BPMI. (2025). Presiden Prabowo Perintahkan Evaluasi Langsung Izin Tambang di Kawasan Raja Ampat. *Presidenri.Go.Id*. <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/president-prabowo-perintahkan-evaluasi-langsung-izin-tambang-di-kawasan-raja-ampat/>
- Yonatan, A. Z. (2025). Penjualan Mobil Listrik di Indonesia Naik 211% pada 2025. *Goodstats.Id*.
<https://goodstats.id/article/penjualan-mobil-listrik-di-indonesia-naik-211-pada-2025-jpwuE>